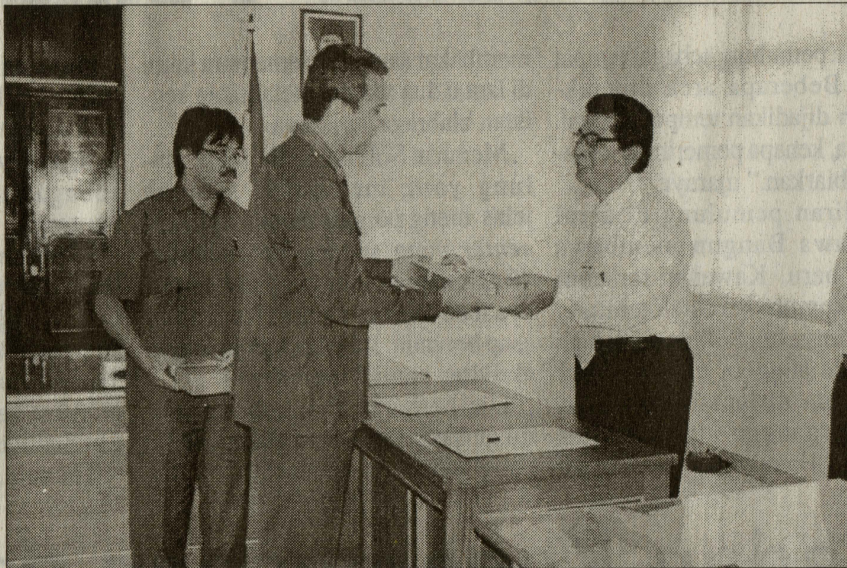


LHP BPK Keuangan Landak Tidak Wajar



Kundorie/Equator

Juadi Wahid menyerahkan LHP BPK kepada Sukiman didampingi Klemen Apui, Jumat (29/10).

PONTIANAK. Tahun 2008 lalu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Landak dinilai Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak wajar. Tahun 2009 juga mendapatkan nilai sama. Mestinya tiap tahun

ada peningkatan laporan pengelolaan keuangan.

Kita sudah berusaha memperbaiki laporan keuangan. Namun hasilnya masih tidak wajar. Ini segera akan kita perbaiki, kata Wabup Landak, Agustinus Sukiman didampingi Wakil Ketua DPRD Landak, Klemen Apui usai menerima LHP BPK di Kantor BPK Perwakilan Kalbar di Pontianak, Jumat (29/10) lalu.

Dua LHP BPK Keuangan Pemkab Landak yang dikemas seperti kado dan diserahkan langsung pelaksana harian (Plh) Kepala BPK Kalbar, Juadi Wahid. Satu diserahkan ke Wabup Sukiman, dan satunya ke Wakil Ketua DPRD Landak. Sayang, laporan tidak diberikan untuk umum. LHP BPK ini segera disampaikan ke Pak Bupati.

Untuk langkah berikutnya tentu kita menunggu arahan dari Pak Bupati, ujar Sukiman.

Di tempat sama, Klemen Apui menyatakan, penilaian tidak wajar kalau diurutkan ranking, berada di posisi ketiga. Ranking pertama adalah wajar, kedua wajar dengan catatan, ketiga tidak wajar, dan keempat *disclaimer opinion* (tak ada pendapat).

Dari pada *disclaimer opinion*, memang lebih baik tingkatannya dengan tidak wajar. Bagi legislatif, penilaian tidak wajar tersebut mesti menjadi perhatian serius Bupati. Soalnya, tahun 2008 juga penilaian demikian. Semestinya, LHP tersebut meningkat menjadi wajar dengan catatan, papar legislator dari Partai Golkar ini.

Klemen Apui berharap, tahun 2010 akan datang, LHP mesti

meningkat dari tahun ini. Kalau juga tidak ada peningkatan, berarti tidak ada perbaikan. Kalau penilaian LHP wajar, tentu kita semua akan senang. Sebagai anggota dewan hanya berharap tahun depan penilaian harus meningkat lagi, harapnya.

Ditanya apa yang menyebabkan penilaian LHP BPK menjadi tidak wajar? Klemen menduga, biasanya ada beberapa laporan keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya di tahun 2009, di tahun sebelumnya apabila ada dana tak bisa dipertanggungjawabkan tetap dimasukkan.

Selama ada dana tak bisa dipertanggungjawabkan, penilaian LHP tetap demikian. Soal tersebut yang tahu persis tentunya pihak eksekutif, ujar Klemen. (ros)